

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha yang mampu mengurangi beban berat yang dihadapi oleh perekonomian nasional (Helmalia & Afrinawati, 2018). Alasan mengapa UMKM dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena usaha yang paling strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak (Wicaksono & Nuvriasari, 2015). UMKM merupakan sumber mata penghidupan bagi banyak orang dan dapat memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan (Idawati & Pratama, 2020). Sampai saat ini, UMKM dianggap sebagai D. sektor efektif dalam meningkatkan taraf perekonomian.

Laju pertumbuhan UMKM yang cukup cepat, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan usaha-usaha berskala besar. Sektor UMKM mempunyai peran yang strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Adawiyah, 2015). Sampai saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta UMKM, yang terbagi menjadi 3: usaha mikro, kecil, dan menengah (Suindari & Juniariani, 2020). Pertumbuhan ekonomi terlihat dari kegiatan usaha kecil yang signifikan, baik itu di sektor tradisional maupun modern melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah merilis per tahun 2012 jumlah UMKM yang ada di Indonesia mencapai angka 64.194.057 unit. Selanjutnya jumlah UMKM di Kota Semarang yang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota terbesar

mencapai 17.602 unit per September 2020 (Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang).

UMKM sebagai penyongkong perekonomian dilihat melalui peristiwa di tahun 1997 hingga 1998, yaitu adanya krisis moneter dan ekonomi. Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia mengakibatkan lemahnya perekonomian nasional. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. UMKM dapat diperhitungkan dalam meningkatkan kekompetitifan pasar dan stabilitas sistem ekonomi yang ada (Mikro et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa setelah pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga 1998, jumlah UMKM tidak berkurang justru meningkat, bahkan mampu mempunyai 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012 (Pratama & Purnaningsih, 2020). Oleh karena itu, UMKM dianggap sebagai salah satu sektor yang memainkan peran penting dan memberikan dampak besar terhadap kemajuan suatu negara.

Di awal tahun 2020 wabah Covid-19 positif masuk ke Indonesia. Covid-19 merupakan penyakit berbahaya yang diakibatkan oleh penularan virus corona. Semua sektor yang ada di Indonesia termasuk sektor UMKM mendapatkan imbas dari wabah Covid-19. Persoalan di atas akan menjadi semakin berat dengan adanya imbauan pemerintah soal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebanyak 17.602 UMKM di Kota Semarang terancam tidak mendapatkan penghasilan/pemasukan seperti kondisi biasanya bahkan ada yang memilih untuk tutup sementara selama pandemi Covid-19. Di sisi lain, pelaku usaha UMKM juga harus tetap mengangsur bunga pinjaman, membayar kredit pinjaman dan

harus melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Dalam kondisi seperti ini, para pelaku usaha UMKM sangat membutuhkan program bantuan sosial dari pemerintah, agar UMKM tetap tumbuh dan berkembang selama pandemi Covid-19.

Dalam situasi pandemi ini, ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi ini ditandai dengan: sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22% melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah (Pakpahan, 2020). Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018 tercatat sebesar 61,41% . Data-data tersebut menandakan bahwa UMKM perlu untuk mempertahankan eksistensi, dan mengembangkan usahanya. Ada beberapa eksistensi solusi jangka pendek untuk tetap menjaga eksistensi. Menurut OECD dalam Pakpahan (2020), beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan yakni: protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktivitas ekonomi oleh UMKM, penundaan pembayaran hutang atau kredit untuk menjaga likuiditas keuangan UMKM, bantuan keuangan bagi UMKM, dan kebijakan struktural.

Untuk menangani dampak pandemi Covid-19, baik pemerintah pusat hingga pemerintah daerah membuat berbagai kebijakan untuk memberikan stimulus ekonomi pada UMKM, antara lain adalah Kebijakan Program Bantuan Sosial bagi UMKM. Pemerintah memberikan bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) berupa Program Bantuan Sosial yang melalui dua instansi pemerintah yang bersangkutan dengan UMKM, yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) dan Kemetrian Perindustrian (Kemenperin). Kedua kementerian ini sudah menyusun berbagai macam strategi untuk membantu UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19. Kemenkop UKM mendapatkan kurang lebih 3 stimulus bagi UMKM untuk menjaga kelangsungan aktivitas UMKM antara lain : kebebasan pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM selama 6 bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro (Rahma, 2020).

Kota Semarang merupakan wilayah dengan jumlah pertumbuhan UMKM cukup tinggi di Indonesia yang melakukan sebuah inovasi program kredit bantuan modal usaha dengan kredit bantuan cukup ringan yaitu sebesar 3% per tahun atau 0,25% per bulan (ppid.semarangkota.go.id). Program bantuan sosial tersebut sudah ada sejak tahun 2017 dengan nama Program Kredit Wirausaha Bangkit Jadi Jawara (Wibawa). Hadirnya program ini membantu UMKM di Semarang untuk mengembangkan usahanya melalui sistem kredit permodalan usaha dengan tingkat bunga yang relatif cukup rendah/ringan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat UMKM melalui pinjaman permodalan usaha tersebut.

Untuk mengelola bantuan sosial dari Pemerintah, UMKM perlu menerapkan *management accounting practice*. Pada UMKM, *management accounting practice* diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan UMKM selama pandemi Covid-19 dengan memperhitungkan berbagai informasi keuangan dan informasi non-keuangan untuk membantu UMKM dalam meningkatkan bisnisnya

di tengah pandemi Covid-19. Dengan perkembangan UMKM saat ini masih ada berbagai masalah dan kendala dalam mengelola UMKM, kurangnya pengalaman dalam mengelola keuangan di UMKM. Pelaku UMKM harus dapat mengelola, mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini *management accounting practice* ditunjuk untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi keperluan manajemen yang berhubungan dengan informasi bagi manajemen untuk pengambilan keputusan akhir. Semakin banyak informasi yang diperoleh untuk membantu UMKM dalam membuat keputusan akhir, maka kualitas UMKM tersebut semakin baik (Herliansyah, 2018). *Management accounting practice* sebagai sistem pengolahan informasi secara efisien, baik itu informasi keuangan dan non keuangan yang dapat menaikkan daya saing untuk membantu menghadapi beragam perubahan dialami UMKM (Putri, Dewi, & Dewi, 2018). Dengan bantuan sosial tersebut, UMKM akan memperhatikan serta lebih berhati-hati dalam mengelolanya, karena terdorong untuk mempraktikkan akuntansi manajemen atas bantuan yang diperoleh dari pemerintah. UMKM akan terdorong untuk mengelola keuangan dengan baik dan melakukan pengelolaan keuangan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atas bantuan yang diperoleh dari pemerintah yang digunakan secara optimal oleh UMKM. Sehingga dengan bantuan sosial tersebut, UMKM mampu meningkatkan daya saing selama pandemi Covid-19, meningkatkan kinerja UMKM, dan mampu memulihkan serta mengembangkan UMKM selama pandemi Covid-19 dengan menerapkan *management accounting practice*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengadaan Program Bantuan Sosial terhadap *Management Accounting Practice* UMKM Sektor Industri Makanan Selama Pandemi Covid-19. Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu yang dilakukan oleh Prihastiwati dan Sholihin (2018) yang berkaitan dengan “*Factors Affecting Use of Management Accounting Practices in Small and Medium Enterprises : Evidence from Indonesia*”. Perbedaan ini terletak pada (1) penggantian variabel “Pengadaan Program Bantuan Sosial” sebagai variabel independen karena dari bantuan sosial yang diberikan tersebut yang nantinya diharapkan dapat mengatasi masalah UMKM dari segi pembiayaan yang dihadapi oleh UMKM di Kota Semarang mengingat dampak pandemi Covid-19 (2) penelitian ini dilaksanakan selama masa pandemi Covid-19 (3) UMKM sektor industri makanan dipilih sebagai sampel penelitian karena masyarakat lebih tertarik dengan olahan pangan dan sektor ini adalah salah satu yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh Pengadaan Program Bantuan Sosial terhadap *Management Accounting Practice* UMKM Sektor Industri Makanan di Kota Semarang Selama Pandemi Covid-19**”.

1.2. Rumusan Masalah

Pada dasarnya UMKM ialah sumber penopang untuk mengatasi masalah perekonomian negara. UMKM dapat juga dikatakan sebagai wadah penyerapan tenaga kerja dan juga sektor yang berkontribusi penuh dalam hal meningkatkan

PDB (Produk Domestik Bruto). Sejak Covid-19 positif masuk ke Indonesia membuat para pelaku UMKM mengalami kendala. Imbasnya ke pelaku UMKM yang tidak memiliki pemasukan/ penghasilan selama pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah memberikan program bantuan sosial bagi UMKM, yang diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi selama pandemi Covid-19. Supaya program bantuan sosial dimanfaatkan dengan baik, UMKM menerapkan *management accounting practice* pada setiap usahanya untuk memperoleh informasi mengenai gambaran atas kondisi laporan keuangan dan menjadi kriteria penilaian kinerja UMKM dalam memudahkan pengambilan keputusan. Sehingga program bantuan sosial ini akan mendorong UMKM untuk mempraktikkan akuntansi management, yaitu untuk mengelola bantuan tersebut melalui *management accounting practice*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan paparan latar belakang di atas, yang dapat dijadikan acuan untuk penyusunan bab-bab selanjutnya. Demikian, pertanyaan yang dapat diajukan sebagai berikut : Apakah terdapat pengaruh pengadaan program bantuan sosial terhadap *Management Accounting Practice* UMKM Sektor Industri Makanan selama Pandemi Covid-19 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh Pengadaan Bantuan Sosial terhadap *Management Accounting Practice* UMKM Sektor Industri Makanan selama Pandemi Covid-19.

1.5. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pengadaan program bantuan sosial dan dampaknya terhadap praktik akuntansi manajemen UMKM di Indonesia khususnya Kota Semarang dan mampu memberikan manfaat di dunia pendidikan khususnya mahasiswa ekonomi agar mengetahui bagaimana cara yang harus dilakukan agar UMKM mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19.

2) Manfaat Praktis

Penelitian dapat dijadikan sebagai rekomendasi mengenai pemberian kebijakan program bantuan sosial bagi UMKM di situasi darurat atau situasi yang tidak terduga dan juga sebagai alat evaluasi pemerintah terkait program bantuan sosial yang diberikan kepada UMKM selama pandemi. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi para pelaku usaha UMKM agar tetap menjaga iklim usaha ditengah situasi tidak menentu.